ESTORIA Journal of Social Sciences & Humanities
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Sejarah Dialektika Otoritas Keagamaan: Dinamika Sejarah Islam di Sumatera Barat dari Praktik Tarekat ke Islam Pembaharuan 1900-1930

Faishal Sultan Bagaskara[1], Agus Kusman[2]

Universitas Indraprasta PGRI[1,2]

Email: faishal.bagas12@gmail.com
aguskusman2024@gmail.com

Abstract

This article examines the historical dialectic of religious authority within the dynamics of Islam in West Sumatra during the period 1900–1930, focusing on the shift from the dominance of traditional tarekat practices to the idea of Islamic renewal. This research aims to analyze the historical process, driving factors, and the forms of religious authority dialectics that developed amidst the socio-intellectual changes in Minangkabau society. The research uses a library study method using secondary sources in the form of books, scientific journal articles, and relevant academic works. The analysis is conducted historically-critically by tracing the transformation of religious ideas, actors, and institutions that shaped the dynamics of Islam in West Sumatra. The findings in this study indicate that the period 1900–1930 was a crucial phase in which the transformation of religious authority took place. This situation was marked by the presence of a dialectic between the authority of tarekat ulama, the surau tradition, and reformist groups who brought the idea of Islamic purification. This dialectic not only gave rise to religious conflict but also encouraged the formation of modern Islamic discourse and institutions in West Sumatra.

Keywords: *Religious Authority, Sufi Order, Islamic Revival, West Sumatera.*

Abstrak

Artikel ini membahas sejarah dialektika otoritas keagamaan dalam dinamika Islam di Sumatera Barat pada periode 1900–1930, yang berfokus pada pergeseran dari dominasi praktik tradisi tarekat menuju gagasan Islam pembaharuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses historis, faktor pendorong, serta bentuk dialektika otoritas keagamaan yang berkembang di tengah perubahan sosial-intelektual masyarakat Minangkabau. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara historis-kritis dengan menelusuri transformasi gagasan, aktor, dan institusi keagamaan yang membentuk dinamika Islam Sumatera Barat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa periode 1900–1930 merupakan salah

satu fase penting di mana berlangsungnya transformasi otoritas keagamaan. Situasi ini ditandai hadirnya dialektika antara otoritas ulama tarekat, tradisi surau, dan kelompok pembaharu yang membawa gagasan pemurnian Islam. Dialektika tersebut tidak hanya menghasilkan konflik keagamaan, tetapi juga mendorong pembentukan wacana dan institusi Islam modern di Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Otoritas Keagamaan; Tarekat; Islam Pembaharuan; Sumatera Barat*

PENDAHULUAN

Islam di Sumatera Barat memiliki karakter historis yang khas karena perkembangan otoritas keagamaannya berlangsung melalui proses dialektis antara tradisi lokal, jaringan ulama transnasional, serta gerakan pembaruan yang terus mengalami transformasi dari masa ke masa (Aziz et al., 2025). Berbeda dengan beberapa wilayah lain di Nusantara yang memperlihatkan pola dominasi tunggal dalam otoritas keagamaan, masyarakat Minangkabau justru memperlihatkan dinamika yang kompleks melalui interaksi antara adat, surau, ulama tarekat, dan kemudian gerakan pembaruan Islam Kompleksitas tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu laboratorium sosial paling penting dalam memahami perubahan otoritas keagamaan Islam di Indonesia (Andoni et al., 2026).

Pada fase awal perkembangan Islam di Minangkabau, otoritas keagamaan banyak bertumpu pada jaringan ulama tarekat yang berpusat di surau (Siregar et al., 2024). Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai lembaga pendidikan, pusat transmisi ilmu, pembentukan elite religius, serta ruang legitimasi sosial bagi para syekh (Azra, 2017). Dalam konteks ini, tarekat seperti Syattariyah dan Naqsyabandiyah memainkan peran sentral dalam membangun struktur otoritas keagamaan Masyarakat (Fathurahman, 2003). Otoritas tersebut memperoleh legitimasi melalui sanad keilmuan, kharisma ulama, hubungan guru-murid, serta kemampuan mengintegrasikan ajaran Islam dengan struktur adat Minangkabau (Sutan Mamad, 2019). Tradisi keagamaan yang berkembang melalui tarekat pada akhirnya membentuk corak Islam lokal yang bersifat akomodatif dan

berakar kuat dalam kehidupan sosial Masyarakat (Muh. Kharisman et al., 2024).

Namun, memasuki abad ke-19 hingga abad ke-20, konfigurasi otoritas keagamaan tersebut mulai mengalami perubahan. Intensitas mobilitas intelektual ulama Minangkabau ke Makkah membawa masuk gagasan pemurnian, rasionalisasi, dan pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah (Nashir, 2008). Jaringan intelektual tersebut memperkenalkan kritik terhadap praktik keagamaan yang dianggap sarat taklid, bid'ah, dan kultus terhadap otoritas tarekat (Azra, 2017). Sekembalinya ke Minangkabau, para ulama pembaharu berupaya membangun model keberagamaan baru yang menekankan kepada ijtihad, pemurnian akidah, pendidikan modern, serta penggunaan media cetak sebagai sarana penyebaran ide (Zikriadi et al., 2023). Gerakan ini kemudian melahirkan kelompok yang dikenal sebagai Kaum Muda, yang menjadi representasi penting dari Islam pembaharuan di Sumatera Barat (Nashir, 2008).

Kemunculan Kaum Muda tidak hanya menandai lahirnya gerakan intelektual Islam modern, tetapi juga menghadirkan kontestasi baru mengenai sumber dan legitimasi otoritas keagamaan (Burhanuddin, 2012). Jika sebelumnya otoritas ulama didasarkan pada tradisi tarekat, sanad, dan kharisma keulamaan, maka Islam pembaharuan menawarkan otoritas berbasis argumentasi tekstual, rasionalitas, pendidikan modern, serta keterhubungan dengan wacana reformisme Islam global (Azra, 2017). Perubahan tersebut memunculkan dialektika antara Kaum Tua sebagai representasi otoritas tradisional dan Kaum Muda sebagai representasi otoritas reformis (Daya, 1989). Perdebatan mereka mencakup persoalan tarekat, taklid, ijtihad, ziarah kubur, maulid, hingga model pendidikan Islam yang ideal. Meskipun sering dipahami sebagai konflik teologis, pada hakikatnya perdebatan tersebut juga merupakan perebutan legitimasi atas siapa yang berhak menjadi otoritas penafsir agama di tengah masyarakat Minangkabau (Lubis, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan tarekat, gerakan Kaum Tua dan Kaum Muda, modernisasi pendidikan Islam, maupun sejarah pembaharuan Islam di Minangkabau. Akan tetapi, sebagian besar studi

tersebut masih melihat tarekat dan pembaharuan Islam sebagai dua entitas yang terpisah atau semata-mata berada dalam kerangka konflik ideologis (Muh. Kharisman et al., 2024). Kajian yang secara khusus memosisikan perubahan tersebut sebagai dialektika historis otoritas keagamaan—yakni perubahan mekanisme legitimasi, distribusi kewenangan religius, dan transformasi struktur kepemimpinan Islam—masih relatif terbatas (Fitri et al., 2023). Padahal, perspektif otoritas keagamaan memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif mengenai kesinambungan dan perubahan Islam di Sumatera Barat (Aziz et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dialektika otoritas keagamaan dalam sejarah Islam di Sumatera Barat melalui transformasi dari dominasi praktik tarekat menuju kemunculan Islam pembaharuan. Dengan menggunakan pendekatan sejarah intelektual dan sejarah sosial keagamaan, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan dibangun, dipertahankan, diperdebatkan, serta direkonstruksi dalam perubahan sosial masyarakat Minangkabau. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini bahwa pendidikan dijadikan sebagai medan utama rekonstruksi otoritas keagamaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam studi sejarah Islam Indonesia, khususnya mengenai dinamika relasi antara tradisi, pembaharuan, dan pembentukan otoritas keagamaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan metode tersebut dalam menganalisis perkembangan Islam di Sumatera Barat pada periode 1900–1930. Sumber penelitian berfokus kepada buku-buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang membahas sejarah tarekat,

gerakan pembaharuan Islam, dinamika ulama Sumatera Barat yang terkait dengan urusan agama, adat, dan perubahan sosial. Pemanfaatan sumber sekunder diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan historiografi dalam rangka membandingkan interpretasi mengenai perubahan otoritas keagamaan di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan dalam metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Sjamsuddin, 2007). Pada tahap heuristik, peneliti menelusuri dan mengumpulkan literatur (Kuntowijoyo, 2005) yang berfokus kepada buku akademik dan artikel dari jurnal ilmiah yang relevan. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci, antara lain tarekat, otoritas ulama, Islam pembaharuan Islam di Sumatera Barat pada awal abad ke-20. Pada tahap verifikasi, pemilihan literatur mengacu kepada tahapan kritik internal berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit atau jurnal, kejelasan identitas bibliografis, dan kontribusinya terhadap pemahaman konteks sejarah periode 1900–1930.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan dan menghubungkan informasi yang telah dievaluasi untuk menjelaskan dinamika sejarah otoritas keagamaan di Sumatera Barat. Analisis diarahkan pada perkembangan praktik tarekat dan otoritas ulama tradisional, khususnya dalam menganalisis gagasan pembaharuan Islam, serta meruncingnya perdebatan keagamaan antara kelompok-kelompok ulama.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian ke dalam narasi sejarah yang sistematis, kronologis, analitis, dan argumentatif. Historiografi penelitian ini diarahkan untuk memperlihatkan hubungan antara praktik tarekat, dinamika ulama tradisional, dan munculnya gerakan pembaharuan Islam dalam pembentukan wacana keagamaan di Minangkabau.

Batasan penelitian dalam sisi diakronik mengacu pada tahun 1900-1930 di wilayah Sumatera Barat, khususnya pada ranah sosial-keagamaan. Pemilihan periode tersebut mengacu pada berkembangnya wacana pembaharuan Islam, perdebatan keagamaan antarkelompok ulama, dan perubahan kelembagaan pendidikan serta media Islam pada awal abad ke-20.

Meskipun secara umum, kajian terhadap sumber sezaman atau historiografi Tradisional Islam biasanya erat kaitannya dengan penelitian filologi (Bagaskara, 2024). Penelitian ini berfokus kepada sumber-sumber sekunder, penelitian ini tidak mengklaim telah melakukan verifikasi secara langsung terhadap sumber-sumber sezaman yang mengacu pada manuskrip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Keagamaan Minangkabau Menjelang Abad ke-20

Sejarah Islam di Sumatera Barat pada awal abad ke-20 sangat erat kaitannya dengan struktur sosial-keagamaan yang telah terbentuk melalui jaringan surau, ulama, tarekat, dan tradisi keilmuan Islam. Surau sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat transmisi pengetahuan, pembentukan jaringan ulama, dan reproduksi otoritas keagamaan (Azra, 2017). Dalam konteks tersebut, otoritas seorang ulama tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan formal, tetapi dibangun melalui penguasaan ilmu agama, hubungan guru-murid, reputasi kesalehan, jaringan keilmuan, serta kemampuan memberikan legitimasi keagamaan kepada praktik sosial Masyarakat (Burhanuddin, 2012).

Dalam perkembangan berikutnya, tarekat, khususnya Syattariyah, menjadi salah satu instrumen penting dalam pembentukan otoritas tersebut. Tarekat tidak hanya sebuah praktik spiritual yang berfokus pada aspek hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga membentuk jaringan sosial antara syekh, ulama, murid, dan masyarakat (Wahab & Duri, 2020) . Otoritas syekh memperoleh legitimasi melalui pengetahuan agama sekaligus pengalaman spiritual dan hubungan silsilah tarekat. Karena itu, otoritas keagamaan dalam masyarakat Minangkabau bersifat multidimensional: terdapat otoritas berbasis kitab dan ilmu, otoritas berbasis genealogis melalui jaringan guru-murid, serta otoritas berbasis pengalaman spiritual (Muh. Kharisman et al., 2024).

Kajian tentang tarekat di Minangkabau memperlihatkan bahwa, kelompok tersebut memiliki peran historis dalam membentuk hubungan antara Islam dan adat. Bahkan ketika kemudian memperoleh kritik dari kelompok pembaharu, kelompok tarekat tidak serta-merta menghilang, melainkan menunjukkan kemampuan beradaptasi dan mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, istilah "dominasi tarekat" dalam penjabaran artikel ini tidak dipahami sebagai kondisi di mana seluruh masyarakat Minangkabau hanya mengikuti tarekat. Secara lebih spesifik menyorot pada model otoritas keagamaan yang berakar kuat pada sosok ulama, surau dan jaringan tarekat yang memiliki posisi vital dalam menentukan validitas pengetahuan dan praktik keagamaan di Sumatera Barat.

Otoritas tarekat pada dasarnya dibangun melalui tiga mekanisme utama antara lain: transmisi ilmu, legitimasi spiritual, dan jaringan sosial. transmisi ilmu berlangsung melalui hubungan guru dan murid. Surau menjadi ruang tempat seorang murid memperoleh pengetahuan agama sekaligus membangun kedekatan sosial dengan gurunya. Ulama tidak hanya berperan dalam otoritas keilmuan saja, tetapi juga mencakup figur yang mempunyai hak moral untuk memberikan arahan kepada Masyarakat (Muh. Kharisman et al., 2024).

Legitimasi spiritual menjadi sumber penting dalam otoritas tarekat. Silsilah keilmuan dan spiritual mempertautkan seorang syekh dengan jaringan guru sebelumnya. Dengan demikian, otoritas tidak muncul secara individual, tetapi turut dibangun melalui genealogi keilmuan. Dalam perspektif sejarah sosial keagamaan, struktur tersebut memungkinkan otoritas ulama direproduksi lintas generasi (Alfurqan et al., 2025).

Kemudian, tarekat turut membentuk jaringan sosial yang jauh lebih luas, di mana relasi antara surau dan masyarakat menciptakan ruang komunikasi keagamaan yang memungkinkan ulama memberikan penafsiran terhadap berbagai persoalan sosial. Oleh karena itu, otoritas keagamaan tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat Minangkabau yang memiliki hubungan kompleks antara agama, adat, keluarga, dan komunitas lokal. Maka dari itu, dalam konteks dinamika Islam di Sumatera Barat, surau dapat

dipahami sebagai tempat di mana otoritas keagamaan diproduksi sekaligus menjadi arena kontestasi (Alfurqan et al., 2025).

Kontestasi Dialektika Keagamaan: Dari Otoritas Tarekat menuju Otoritas Pembaharuan

Menjelang awal abad ke-20, struktur otoritas keagamaan di Sumatera Barat perlahan mengalami perubahan yang diawali dengan meningkatnya mobilitas intelektual ulama lokal, khususnya melalui hubungan dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, khususnya Mekkah dan Madinah. Dua kota suci tersebut berperan dalam proses dalam lahirnya dinamika keagamaan tersebut (Andoni et al., 2026). Ulama Minangkabau yang belajar di Haramain tidak hanya memperoleh pengetahuan keislaman, tetapi juga berinteraksi dengan perkembangan pemikiran Islam yang lebih luas. Ketika kembali ke daerah asalnya, sebagian dari mereka membawa gagasan mengenai purifikasi ajaran, ijtihad, pendidikan modern, dan kritik terhadap praktik keagamaan tertentu (Daya, 1989).

Implikasi dari situasi tersebut, terjadi perubahan mendasar dalam sumber legitimasi keagamaan. Jika sebelumnya legitimasi banyak bertumpu pada silsilah guru, otoritas syekh, tradisi surau, dan praktik tarekat, maka kelompok pembaharu mulai menekankan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kemampuan argumentasi keilmuan, ijtihad, serta menafsirkan ulang praktik keagamaan di tengah masyarakat (Muh. Kharisman et al., 2024). Pada situasi inilah berlangsung dialektika otoritas keagamaan, di mana kelompok pembaharu tidak sekadar menawarkan doktrin baru, tetapi juga mempertanyakan siapa yang berhak menentukan kebenaran agama.

Kondisi tersebut tertulis dalam alur Sejarah perkembangan di Sumatera Barat yang dikenal dengan konflik antara Kaum Tua dan Kaum Muda (Zikriadi et al., 2023). Persoalan konflik mengenai epistemologi dan legitimasi keagamaan tersebut bukan hanya terletak pada proses peninjauan benar atau salah terhadap suatu ritual tertentu, tetapi juga menyangkut perkara, siapa yang

mempunyai otoritas untuk menentukan benar-salahnya praktik tersebut (Nashir, 2008). Proses dialektika keagamaan di Sumatera Barat kemudian terus berkembang, di mana kelompok modernis yang melakukan pembaharuan keagamaan terus memperjuangkan purifikasi Islam melalui pendirian institusi pendidikan Islam (Syafrina, 2021).

Kontestasi antara Kaum Tua dan Kaum Muda merupakan salah satu manifestasi paling jelas dari dialektika otoritas keagamaan di Sumatera Barat. Kaum Tua memiliki basis legitimasi yang kuat melalui jaringan ulama tradisional, surau, kitab-kitab klasik, tarekat, dan praktik keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat di mana otoritas legitimasi mereka diperoleh melalui kesinambungan tradisi keilmuan. Sementara Kaum muda, mereka membangun legitimasinya melalui kritik intelektual terhadap tradisi keagamaan sebelumnya. Mereka tidak sepenuhnya menolak ulama, tetapi berusaha melakukan redefinisi kriteria seorang ulama. Bagi Kaum Muda, penguasaan terhadap kitab dan keterhubungan dengan tradisi lama dianggap tidak selalu bersifat otoritatif. Seorang ulama ideal menurut paradigma pembaharuan harus mampu memahami sumber Islam secara langsung dan menggunakan penalaran untuk menjawab berbagai persoalan baru di Tengah Masyarakat (Andoni et al., 2026).

Perubahan Otoritas melalui Transformasi Pendidikan Islam

Transformasi otoritas keagamaan di Sumatera Barat terus bergulir seiring dengan berdirinya lembaga Pendidikan yang didirikan oleh ulama-ulama pembaharuan. Sudah tentu pada fase ini, terdapat konsekuensi terhadap struktur otoritas. Otoritas tidak lagi hanya berpusat pada seorang syekh yang memiliki hubungan personal dengan murid, tetapi mulai terlembagakan melalui institusi pendidikan.

Pada sistem surau tradisional, keterkaitan antara guru-murid tendensinya lebih bersifat personal di mana pembelajaran berpusat pada figur ulama dan kitab yang dipelajari. Ketika model madrasah mulai berkembang, pola tersebut mengalami perubahan. Pendidikan menjadi lebih terorganisasi, menggunakan sistem kelas, jadwal pembelajaran, kurikulum, dan metode

pengajaran yang lebih sistematis (Azra, 2017). Sementara itu, di sisi lain ulama Islam pembaharuan mendirikan Sumatera Thawalib. Berdirinya Sumatera Thawalib menunjukkan bahwa periode 1918–1930 merupakan fase penting perkembangan pembaharuan pendidikan Islam Minangkabau. Lembaga tersebut tidak hanya melakukan perubahan sistem pendidikan, tetapi juga menjadi medium penyebaran gagasan pembaharuan Islam (Abbas & Afifi, 2022).

Dengan demikian, perubahan pendidikan bukan hanya perubahan pedagogis, tetapi merupakan perubahan struktur otoritas (Andoni et al., 2026). Jika dalam sistem lama seorang murid datang kepada ulama untuk memperoleh ilmu, dalam sistem baru ilmu mulai diorganisasikan melalui lembaga. Hal ini membuat otoritas keagamaan menjadi lebih institusional, rasional, dan terbuka terhadap reproduksi kader ulama baru.

Tradisi tarekat mempertahankan surau sebagai pusat pendidikan, ibadah, suluk, dan pembinaan sosial masyarakat. Kurikulum menitikberatkan pada kitab-kitab fikih Syafi'i, tasawuf, tauhid Asy'ariyah, dan praktik-praktik tarekat (Wahab & Duri, 2020). Sebaliknya, gerakan modernis mendirikan sekolah Islam modern seperti Sumatera Thawalib, Adabiyah *School*, serta madrasah-madrasah Muhammadiyah yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum, menggunakan sistem kelas, kurikulum terstruktur, evaluasi akademik, dan metode pembelajaran modern (Daya, 1989).

Pembaharuan yang dilakukan oleh Sumatera Thawalib tidak hanya sebatas pada materi pelajaran, tetapi juga dengan cara menghasilkan otoritas intelektual baru. Sistem pendidikan modern yang digagas oleh pimpinan Sumatera Thawalib memungkinkan munculnya generasi ulama dan intelektual yang tidak sepenuhnya bergantung pada struktur otoritas lama. Dalam konteks sejarah intelektual, Sumatera Thawalib menjadi ruang transmisi gagasan reformis. Ide pemurnian Islam, ijtihad, pendidikan, dan perubahan sosial tidak lagi hanya beredar melalui hubungan guru-murid dalam surau, tetapi melalui lembaga pendidikan dan jaringan intelektual yang lebih luas (Saerozi, 2014). Perubahan tersebut menghasilkan konsekuensi sosial yang lebih luas. Otoritas

keagamaan menjadi semakin terkait dengan kemampuan intelektual, kemampuan mengorganisasi pendidikan, kemampuan menulis, serta kemampuan merespons persoalan sosial-politik masyarakat.

Dalam konteks sejarah intelektual, perubahan tersebut sangat penting. Kontestasi antara Kaum Tua dan Kaum Muda tidak hanya berlangsung dalam ruang sosial lokal, tetapi juga melalui produksi pengetahuan dan diskursus publik (Andoni et al., 2026). Akibatnya, otoritas agama mengalami proses demokratisasi sekaligus fragmentasi. Demokratisasi karena semakin banyak orang dapat mengakses gagasan agama; fragmentasi karena semakin banyak aktor dapat mengklaim kemampuan memberikan interpretasi keagamaan (Syafrina, 2021). Jika dianalisis melalui perspektif sejarah sosial keagamaan, perubahan otoritas keagamaan tidak dapat dipisahkan dari perubahan masyarakat Minangkabau. Awal abad ke-20 merupakan periode meningkatnya pendidikan, mobilitas sosial, perkembangan komunikasi, penetrasi pemerintahan kolonial, serta hubungan yang semakin luas antara Minangkabau dan dunia Islam internasional (Andoni et al., 2026).

Dalam basis epistemologi agama, Kelompok tarekat mengembangkan otoritas keagamaan berdasarkan kesinambungan sanad keilmuan (ijazah), hubungan murid–syekh, serta legitimasi spiritual yang diwariskan melalui silsilah tarekat. Tarekat memandang bahwa pengetahuan agama dipandang tidak hanya diperoleh melalui penguasaan teks, tetapi juga melalui proses *tazkiyatun nafs*, r*iyadha*h, dan pembinaan akhlak di bawah bimbingan seorang mursyid (Selvia et al., 2022).

Sebaliknya, Islam modern memandang legitimasi keagamaan terutama bersumber pada penguasaan Al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan rasional, filologis, dan ijtihad. Tokoh-tokoh seperti Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), Abdullah Ahmad, dan kemudian HAMKA mendorong pembacaan langsung terhadap sumber primer Islam serta mengurangi ketergantungan terhadap taqlid kepada guru maupun mazhab tertentu. Islam modern memperkenalkan model otoritas yang lebih terbuka. Keilmuan seorang ulama dinilai berdasarkan kemampuan memahami dalil, menyampaikan argumentasi rasional, serta berpartisipasi dalam diskursus publik melalui sekolah,

organisasi, majalah, dan forum ilmiah. Dengan demikian, otoritas tidak lagi dimonopoli oleh jaringan tarekat, tetapi menjadi ruang yang lebih kompetitif (Muh. Kharisman et al., 2024).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan kajian historis terhadap berbagai sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa dinamika Islam di Sumatera Barat pada periode 1900–1930 memperlihatkan suatu proses dialektis dalam pembentukan dan transformasi otoritas keagamaan. Perubahan tersebut tidak berlangsung dalam bentuk pergantian yang sederhana dari dominasi tarekat menuju Islam pembaharuan, melainkan melalui proses perjumpaan, perdebatan, kritik, negosiasi, dan reproduksi otoritas keagamaan di tengah perubahan sosial dan intelektual masyarakat Minangkabau.

Memasuki awal abad ke-20, struktur otoritas tersebut menghadapi tantangan dari munculnya gagasan Islam pembaharuan yang berkembang melalui jaringan ulama, pendidikan, penerbitan, dan hubungan intelektual dengan pusat-pusat keilmuan Islam di luar Minangkabau. Kelompok pembaharu mengembangkan bentuk legitimasi baru yang lebih menekankan kemampuan memahami sumber-sumber Islam, penggunaan rasionalitas dalam memahami ajaran agama, kritik terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar kuat, serta pembentukan lembaga pendidikan Islam yang lebih sistematis. Dengan demikian, otoritas keagamaan mulai mengalami pergeseran dari otoritas yang terutama berbasis tradisi, sanad, dan karisma menuju otoritas yang juga bertumpu pada pengetahuan tekstual, argumentasi keagamaan, pendidikan, dan kemampuan merespons perubahan zaman.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah Islam Sumatera Barat pada 1900–1930 merupakan sejarah transformasi otoritas keagamaan yang bersifat dialektis. Pergeseran dari dominasi praktik tarekat menuju berkembangnya Islam pembaharuan

bukanlah proses linear, melainkan proses historis yang dibentuk oleh interaksi antara tradisi dan pembaharuan.

Saran

penelitian berikutnya perlu mengkaji transformasi lembaga pendidikan Islam, khususnya perubahan dari sistem surau menuju madrasah. Perubahan kelembagaan tersebut penting diteliti karena pendidikan merupakan salah satu arena utama dalam reproduksi otoritas keagamaan. Melalui pendidikan, otoritas ulama tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan perkembangan intelektual dan sosial masyarakat.

Penelitian tentang sejarah otoritas keagamaan di Sumatera Barat perlu diarahkan tidak hanya untuk melihat perubahan pemikiran Islam, tetapi juga untuk memahami bagaimana pengetahuan agama, lembaga pendidikan, jaringan ulama, media, dan kondisi sosial-politik bersama-sama membentuk legitimasi keagamaan. Pendekatan demikian diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah Islam Indonesia sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses terbentuknya modernitas Islam di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, A. F., & Afifi, A. A. (2022). Sumatera Thawalib dan Ide Pembaharuan Islam di Minangkabau (1918-1930). *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *3*, 35–45. https://doi.org/10.58764/j.im.2022.3.26

Alfurqan, A., Tamrin, M., Hidayat, A. T., & Syaputri, W. (2025). Harmony and divergence: Unraveling the influence of Surau in Minangkabau religious landscape. *Cogent Arts & Humanities*, *12*(1), 2510057. https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2510057

Andoni, Y., Machmudi, Y., & Abdurakhman, A. (2026). FROM CONTESTATION TO CONSENSUS: Religious Authority and the

Making of Islamic Moderation in Post-Padri War Minangkabau, 1830–1869. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *50*(1), 353. https://doi.org/10.30821/miqot.v50i1.1507

Aziz, N., Rama, B., & Syamsuddin. (2025). *Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Di Sumatera Barat, (Lembaga & Tokohnya). Surau, Syekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman*. *1*(1).

Azra, A. (2017). *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi*. Kencana.

Bagaskara, F. S. (2024). PERAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL ISLAM DALAM MEREKONSTRUKSI SEJARAH ISLAM DI INDONESIA. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, *4*(2), 639–652. https://doi.org/10.30998/je.v4i2.2757

Burhanuddin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Mizan.

Daya, B. (1989). *SUMATRA THAWALIB DALAM GERAKAN PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI SUMATERA BARAT*. *38*.

Fathurahman, O. (2003). *Tarekat Syattariyyah di dunia Melayu-Indonesia: Kajian atas dinamika dan perkembangannya melalui naskah-naskah di Sumatra Barat* [Dissertation]. University of Indonesia.

Fitri, F., Parawansa, J., Rahma, S., Muslim, K. L., & Nofra, D. (2023). Tokoh Pelopor Islam di Sumatera Barat pada Zaman Kolonial. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, *27*(1), 16–23. https://doi.org/10.37108/tabuah.v27i1.947

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng.

Lubis, A. (2022). *PERKEMBANGAN DAKWAH DAN PENDIDIKAN ISLAM MASA AWAL DI SUMATERA BARAT, LEMBAGA DAN TOKOHNYA*. *5*(1).

Muh. Kharisman, Bahaking Rama, & Arifuddin Siraj. (2024). Jejak Pendidikan Islam di Sumatera Barat: Sejarah Awal, Lembaga dan Tokoh Inspiratif. *TARQIYAH: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, *2*(2), 110–127. https://doi.org/10.66017/tarqiyah.v2i2.17

Nashir, H. (2008). Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di Minangkabau. *Unisia*, *31*(69), 219–230. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art1

Saerozi, M. (2014). Model of strategies in developing Islamic thought through curriculum: A study of Sumatra Thawalib. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *4*(2), 233. https://doi.org/10.18326/ijims.v4i2.233-255

Selvia, A., Yulianti, E., Wulandari, F. S., & Fadhilah, M. A. (2022). Praktek Suluk pada Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Tahun 1905-2020 di Sumatera Barat (Studi Kasus: Kota Padang Tahun 1905-2020). *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *1*(3), 121–127. https://doi.org/10.57251/hij.v1i3.910

Siregar, Y. D., Sepriani, L., Azwar, R., & Pratama, R. (2024). Awal Perkembangan Islam di Sumatera Barat Pasaman Barat. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *3*(7), 2096–2102. https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.764

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.

Sutan Mamad, F. (2019). DINAMIKA HISAB TAQWIM TAREKAT SYATTARIYAH DI SUMATERA BARAT. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, *17*(1), 1–20. https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1754

Syafrina, Y. (2021). Fase Dalam Gerakan Pembaharuan Islam di Minangkabau: Dari Reformis ke Modernis. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *9*(2). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i2.9039

Wahab, Z., & Duri, S. H. (2020). *Pengembangan Dakwah Kelompok Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat. 4*.

Zikriadi, Bahaking Rama, & Muhammad Rusdi Rasyid. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Di Sumatera Barat, Lembaga dan Tokohnya. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(2), 142–150. https://doi.org/10.58540/pijar.v1i2.155